

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK

(Studi Kasus Putusan No. 116/Pid.B/2013/PN.TK)



OLEH:

ASROWINSYAH ROSA UTAMA

B 111 10 489

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
TERNAK**

(Studi Kasus Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.TK)

OLEH:

ASROWINSYAH ROSA UTAMA

B 111 10 489

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK

(Studi Kasus Putusan No. 116/Pid.B/2013/PN.TK)

Disusun dan diajukan oleh

ASROWINSYAH ROSA UTAMA


B 111 10 489

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 25 Agustus 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002


Hj. Haeranah, S.H.,M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : ASROWINSYAH ROSA UTAMA
Nomor Induk : B 111 10 489
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN TERNAK (Studi Kasus
Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.TK)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam Ujian
Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Agustus 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212199103 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

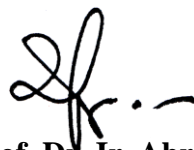
Nama : **ASROWINSYAH ROSA UTAMA**
No. Pokok : B 111 10 489
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak
(Studi Kasus Putusan No. 116/Pid.B/2013/PN.TK)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 14 Agustus 2014

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H

Nip. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ASROWINSYAH ROSA UTAMA (B 111 10 489), Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 116/Pid.B/2013/PN.TK) dengan dosen pembimbing Bapak Muhadar dan Ibu Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian hewan yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 116/Pid.B/2013/PN.TK dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ternak dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 116/Pid.B/2013/PN.TK.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Takalar dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara pencurian ternak ini serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencurian ternak yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi penulis.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 116/Pid B/2013/PN.TK yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 116/Pid.B/2013/PN.TK berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan bukanlah untuk menghancurkan masa depan maupun pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan penguasa dan pemilik semesta alam yang telah memberi banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak (Studi Kasus Putusan Nomor 116/Pid.B/2013/PN.TK)*” sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Salam dan Shalawat kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis.

Skripsi ini , ku persembahkan kepada Ibunda tercinta **drg. Resi Rosawati** dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku juga kepada Alm. Ayahanda tercinta **dr. H. Agus Salim Ismet** yang telah mendidik anak-anaknya dengan kesederhanaannya agar penulis tidak hanya memikirkan dunia semata karena masih ada kehidupan setelah dunia yaitu akhirat, juga membantu dan menafkahiku dalam menyelesaikan studi dengan penuh perjuangan dan ketulusan. Serta kakak kandung saya tercinta **Septi Caesari Rosa Utami** yang selalu memberikan dukungan yang tidak ternilai harganya.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkanlah penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini:

Pada Kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa, bimbingan, motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** selaku Pembimbing I dan ibu **Hj. Haeranah, S.H., M.H.** yang telah senantiasa mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Bapak **Prof. Andi Sofyan, S.H., M.H.**, Bapak **Abd. Asis, S.H., M.H.**, dan Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. **Seluruh dosen, staf bagian hukum pidana, serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,**

Pak Usman, Pak Ramalan, Kak Tri, Pak Bunga, Ibu Sri dan lain-lain, yang telah memberikan ilmu dan nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

6. Terima kasih kepada **Ketua Pengadilan Negeri Takalar** yang mewakili Bapak **Muchlis, S.H.** sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takalar atas izin yang diberikan pada penulis agar dapat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Takalar.
7. Terima Kasih kepada **Dewy Puspita Sari** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
8. Kepada sahabat-sahabatku **“SUNEZA”**, Alm. **Isywal A. Mappesangka, Muh. Triocsa, Azizah Irfan Arief, Febrianto, Wahyu Eka Putra, Febry Nur Naim, Muh. Dzulfan, Septian Eka Sakti, Wahyuddin, S.H., Aris Munandar, S.H., Abdul Basith, Dimas Asyraf Arief, Sarnubi Arifudin, Tayeb Gobel, Fuad Anshari, Muh Fadly, Alfian Latief, Fahriansyah, Emil ilham, Syahrul Alam ,Firmansyah, Ahmad Ryandi Pratama, Rizwan Ilham, Ardiansyah Kadir, Ulil Insan Kamil, Fajriansyah, Ryansyah, Muadz Anshari, Ricky Tangkau** yang selalu ada di setiap waktu penulis membutuhkan, bagaimanapun keadaannya. Terima kasih atas berbagi pengalamannya selama ini dan yang selalu setia menemani dan memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis.
9. Kepada **“SLEMMERSINDO”**, **Bang Fauzi Andi Wawo (Beu), Puang Echa, Kanda Riril, Kanda Noske, Kanda Chali**, beserta seluruh jajarannya.

10. Kepada Kakanda- kakanda, **Budiman, Didi Rasyid** beserta senior-senior yang pernah membimbing dan sharing dalam urusan pengalaman hidup kepada penulis.
11. Kepada teman-teman 3.co **Mei, Ryma, Wandy, Oji** yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar **HLSC 2010 (Hasanuddin Law Study Center)** Khususnya kepada, **Arfhani Ichsan, Tri Ayu Sudarti, S.H., Nadya Sestiasah S.H, Haifa Khaerunnisa S.H, Kiki, Buja, Pradana Firmansyah, Achsan Rumi, Muh. Furqan, Faqih Ahshabul, Alatas, Djaelani, Adit Neymar, Wildan Saifullah, Cesar, Try, Aldi, Kiprah, Ardi, Ruly, Ikky, Saddam** yang memberikan banyak dukungan kepada penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada adinda **HLSC angkatan 2011, 2012, 2013** Terima kasih atas segala dukungan dan telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
14. Terima kasih kepada kanda **Raditya Darmawan (Kak Dito), Kak Nobo, Kak Rendy , Kak Randy, Kak Nyong, dan Kanda-Kanda "DOJO SQUAD"** atas bantuan dan dukungannya selama ini.
15. Kepada Keluarga Besar **Fakultas Hukum Unhas 2010, Abdi Affandi, Indra, Marie, Sadly, Ahmad Fadel, Andi Oddang, Eka Noviaty, Dhea Adillah, Rahmat Putra, Alif, Aca, Fachrul, Iccank,** dan teman-teman angkatan **Legitimasi 2010** yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungannya dan semoga sukses kedepannya.

16. Kepada Teman KKN Regular Gel 85 Kec. Mapilli, Desa Landi Kanusuang: **Muh. Ashari Sofyan, St. Kadhijah, Indry Rosfani,** dan **Chusnul**. Terima kasih atas segala bantuan pengalaman baru yang diberikan selama KKN.

17. Serta **Hj. Sanni, Cece, Bu'de, Pa'de, Mace Sija** beserta crew-crew kantin hukum dan Kansas yang menjadi naungan dikala penulis sedang lapar maupun haus.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalam

Makassar, 23 Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSERUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
B. Pencurian	18
1. Pengertian Pencurian	18
2. Jenis-Jenis Pencurian.....	19
3. Unsur-Unsur Pencurian	24
C. Hewan	33
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	34
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan dalam Perkara Putusan No, 116/Pid.B/2013/PN.TK	49
1. Posisi Kasus.....	50
2. Dakwaan Penuntut Umum	51
3. Tuntutan Penuntut Umum	58
4. Analisa Penulis.....	61
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Hewan dalam Perkara Putusan No, 116/Pid.B/2013/PN.TK	62
1. Pertimbangan HukumHakim dalam Memutus Perkara	62
2. Amar Putusan.....	65
3. Analisa Penulis.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi yang kejam. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini

dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat dewasa ini semakin canggih dan semakin banyak seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, perkosaan dan lain sebagainya saat ini menjadi tindak pidana yang sering diberitakan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Hukum menerapkan apa yang harus dilakukan dan/ atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak

dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah pencurian.

Kebanyakan tindak pidana pencurian dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur atau orang dewasa. Terlepas itu semua, tindak pidana pencurian yang dilakukan baik oleh anak maupun orang dewasa, menurut hukum tidak dapat dibenarkan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP (R. Soesilo, 1995:249) yang dirumuskan sebagai berikut:

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Dari beberapa kasus pencurian yang diproses pada Pengadilan Negeri Takalar, yang menarik untuk diteliti penulis adalah pencurian ternak yang terjadi di kabupaten Takalar, pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan mobil untuk mencuri kambing. Melihat hal tersebut, penulis menarik untuk mengkaji putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ternak tersebut yang sudah diputus pada Pengadilan Negeri Takalar.

Dalam tindak pidana pencurian ternak ini, Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tentunya akan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan

terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan memperingan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian. Kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa adalah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai yuridis/ hukumnya serta mendasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang hendak penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian ternak dalam perkara Putusan Nomor 116/Pid.B/2013/PN.TK ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ternak dalam perkara Putusan Nomor 116/Pid.B/2013/PN.TK ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penulisan proposal ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian ternak dalam perkara Putusan Nomor 116/Pid.B/2013/PN.TK.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ternak dalam perkara Putusan Nomor 116/Pid.B/2013/PN.TK.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai penambah khasanah penelitian di bidang Hukum Pidana, khususnya terhadap tindak pidana pencurian.

2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai hukum pidana pada sebuah kasus yaitu pencurian ternak, serta merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah di lapangan.
3. Bagi peneliti lain hasil ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Selain istilah *strafbaar feit*, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu "*delictum*". Dalam bahasa Jerman disebut "*delict*", dalam Bahasa Perancis disebut delit dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah "*delict*" yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.

Begitu sulit memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan istilah *strafbaarfeit*.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2010:71) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Van Hamel (Leden Marpaung, 2008:7), tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

H.R Abdussalam (2006:3) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* sebagai:

Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.

Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:183) memandang *strafbaarfeit* dari 2 (dua) segi, yaitu:

1. Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah

perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* adalah tindak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dari definisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, memberikan pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah berbahaya yakni dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar "*strafbare feiten*" yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari "*strafbare feiten*" tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu "*strafbaar feit*", yakni bersifat "*wederrechtelijk*", "*aan schuld te wijten*" dan "*strafbaar*" atau yang bersifat "melanggar hukum", telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja" dan "dapat dihukum".

Hezenwinkel-Suringa (P.A.F Lamintang, 1997:18) telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaarfeit*" yaitu:

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka penulis dapat simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana

menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur (P.A.F Lamintang, 1984:184), sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988:104), menyatakan bahwa:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwil atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) mengemukakan bahwa:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam (Tongat, 2006:4), yaitu:

1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam undang-undang adalah akibat berupa matinya orang.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.

2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggungjawab).
 - b. Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:
 - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendiri ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut (Tongat, 2006:5).

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau menyatakan bahwa:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orang), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang ditimbulkan perbuatan tadi ada hubungannya erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana tersebut, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*.

Selanjutnya R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 72-73) menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan umum;
- 3) Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan ;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan R. Tresna, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ke-3. Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Jika diatas diterangkan tentang pandangan *dualisme* yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana, ada pandangan lain yakni pandangan *monisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada beberapa ahli hukum yang berpandangan *monisme* ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana antara lain:

J.E Jonkers (Pipin Syarifin, 2000: 53-54) memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian yaitu sebagai berikut:

- 1) Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh undang-undang;
- 2) Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang

dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

Simons (Lamintang, 1984: 185) telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai berikut:

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis; dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada

Juga terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtedelicten*. Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan

yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut *wetsdelicten*.

B. Pencurian

1. Pengertian pencurian

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat.

Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk memberikan uraian istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun diluar bidang hukum.

Para sarjana tidak memberikan definisi tentang pencurian, tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan Pasal 362 KUHP, diantaranya R. Soesilo (1995:249) mengemukakan bahwa:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-

Menurut Andi Hamzah (2009:100), delik pencurian adalah delik yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua Negara.

Hingga saat ini, penulis belum menemukan satu pun definisi tentang pencurian. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya kualifikasi dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.

2. Jenis-Jenis Pencurian

Pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 (lima) yaitu:

a. Pencurian biasa

Istilah "pencurian biasa" digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian "pencurian dalam arti pokok". Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 1995:249) menjelaskan unsur-unsur pencurian biasa yaitu sebagai berikut:

- 1) Elemen-elemen pencurian biasa sebagai berikut:

- Perbuatan “mengambil”
 - Yang diambil harus “sesuatu barang”
 - Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
 - Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).
- 2) “mengambil” = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.
 - 3) “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
 - 4) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. “sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan di rumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian “dicuri” oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan sebagainya.
 - 5) “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan ke polisi, akan tetapi setelah datang di rumah barang itu

dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan ke polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya.

b. Pencurian Ringan

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam bentuk yang pokok (Pasal 362)
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 (1) ke-4 KUHP), atau
- 3) Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat:
 - Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
 - Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

c. Pencurian dengan pemberatan

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat dalam pasal 363 KUHP.

Andi Hamzah (2009:173) menerjemahkan Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 - a) Pencurian ternak
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP (Soesilo, 1995:253) ini adalah sebagai berikut

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
- Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 yang menyatakan:

- a. Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- b. Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- c. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

3. Unsur-Unsur Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP, R. Soesilo (1995: 249) yang menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Barang siapa
- b) Mengambil
- c) Sesuatu barang
- d) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- e) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Berdasarkan rumusan dari pasal 362 KUHP, maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori unsur-unsur pencurian, yaitu:

a) Unsur-Unsur Obyektif

(1) Mengambil

Unsur perbuatan mengambil barang dengan maksud bahwa suatu barang berada dalam penguasaan mutlak dan mengakibatkan putusanya hubungan antara barang dengan orang yang memilikinya.

Menurut Lamintang (1989:13) yang secara lengkap dalam bahasa Belanda berbunyi:

“Wegnemen is ene gendraging wa ardor man het goed brengthinzijn feitolijske heerrchappij, bedoeling die men ten opzichte van dat goed verder koestert”. (mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut).

Mengambil adalah mengambil untuk dikuasai. Maksudnya untuk mengambil barang itu dan barang tersebut belum dalam kekuasaannya, apabila sewaktu memiliki barang itu telah berada dengannya,

maka perbuatan bukan pencurian tapi penggelapan (Pasal 372 KUHP).Pengambilan (pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.Bila mana seseorang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan “mencoba mencuri” (Soesilo, 1995:250).

Perkembangan dalam hukum pidana menyebabkan pengertian perbuatan “mengambil” dapat pula mengalami penafsiran yang luas, seperti yang dipakai oleh pembuat Undang-Undang yaitu tidak terbatas dengan tangan saja melainkan bisa juga mengambil dengan kaki, atau dengan menggunakan satu macam alat lain, sebagaimana teori alat dalam hukum pidana. Misalnya, dengan sepotong kayu atau besi ataupun menghabiskan bensin dalam mengendarai kendaraan tanpa seizin pemiliknya, walaupun tidak berniat mengambil kendaraan itu.

Disamping itu mengambil aliran listrik dari suatu tempat yang dikehendaki dengan cara menempatkan sepotong kabel untuk mengalirkan muatan listrik tanpa melalui alat ukur Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan pencurian.

Beberapa teori yang terdapat di dalam doktrin menjelaskan tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:

1) Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula.

2) Teori Ablasi

Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

3) Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.

(2) Sesuatu Barang

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang

itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapapun, misalnya sudah dibuang oleh pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo (1995:250) memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya.

Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak saja (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi benda bergerak. Misalnya, sebatang pohon yang telah ditebang, atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat

dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan.

Pada tahun 1921 pengertian kata “barang” hanyalah diartikan barang yang berwujud saja karena pada waktu itu tidak ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil, namun karena perkembangan iptek ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil yaitu “aliran listrik”. Pada tanggal 23 Mei 1921, Arrest Hoge Raad memperluas arti kata barang yang tidak berwujud yaitu aliran listrik sehingga orang yang melakukan pencurian listrik dapat dijatuhi pidana karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

(3) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah

kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP.

Misalnya sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan si B lalu menjualnya. Akan tetapi berbeda halnya apabila semua sepeda tersebut berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP)

Pengertian “orang lain” dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

b) Unsur-Unsur Subyektif

(1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet ais oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Maksud dari

perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan dari dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang kedua menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja. Sebagai unsur subyektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

(2) Melawan Hukum

Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini berarti bahwa “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang

bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

Menurut Moch. Anwar (1986:56), suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (2009:33) menyebutkan bahwa:

Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara memalsukan surat kuasa, dan sebagainya.

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subyektif.

C. Hewan

Dalam pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP unsur yang memberatkan pencurian adalah “ternak”. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedang hewan berkuku dua antara lain kuda, keledai”.

Sementara di sisi lain, ketentuan Pasal 101 KUHP tersebut justru membatasi berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP oleh karena pengertian “ternak” dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 tidak meliputi pluinvee seperti ayam, bebek dan sebagainya sebagai hewan yang justru biasanya ditenakkan.

Unsur “ternak” ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

Kambing adalah hewan berkaki empat dengan sepasang tanduk di kepalanya (saat dewasa), rambut (ada yang menyebut bulu) disekujur badan, kambing merupakan hewan herbivora (pemakan tumbuhan) yang memamah biak.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Pada dasarnya putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.

Dalam penentuan hukuman, seorang hakim diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul. Dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan.

Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.

Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan rumusan KUHP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir sering disingkat dengan istilah putusan saja. Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan catatan/ surat dakwaan, acara dan atau penasihat hukum umum, penetapan/ putusan tuntutan pidana, replik duplik, re-replik dan re-duplik, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah

majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum yang mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya verzet atau perlawanan yang dibenarkan juga dikarenakan dalam hal ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.

Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian majelis hakim, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk:

1) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2000:327), putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan

yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

2) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum”.

3) Putusan Pemidanaan

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut

pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang member keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 84 KUHP yang intinya adalah sebagai berikut:

- a) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
- b) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak

pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan dan sebagainya.

Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili.

5) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2000:329) pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.

6) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

a) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

(1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/ penuntut umum.

(2) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b) Syarat Materiil:

(1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

(2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim

adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam siding suatu perkara dan menjunjung 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam <http://setaaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html?m=1> menjelaskan, kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Secara normative, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi Undang-Undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi symbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang

Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan umum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang diputuskannya.

Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat

dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan:

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Namun secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.
2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi Hakim yang bersangkutan.
3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argument hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.

4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun cukup menentukan kualitas putusan.

Seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan), seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka Penulis memilih lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Takalar dengan pertimbangan terdapat tindak pidana pencurian Hewan Ternak di daerah Takalar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam Penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode:

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli melalui berbagai media.

2. Metode Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan pun

adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak dalam Perkara Putusan Nomor: 116/Pid.B/2013/PN.TK.

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang (selanjutnya disingkat uu) telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana pencurian ternak yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut, dalam perkara Putusan Nomor: 116/Pid.B/2013/PN.TK yang didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: terdapat 2 (dua) orang Terdakwa yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1. Posisi Kasus

Terdakwa I Darwis alias Dawi Bin. Suma Dg. Mangung dan Terdakwa II Iwan Gising Alias Liwang Bin. Dg. Rate, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira antara jam 12.30 wita sampai dengan jam 16.00 wita, kedua terdakwa secara bersama-sama mengambil 7 (tujuh) ekor kambing di 3 (tiga) tempat berbeda. Yang pertama diambil di lapangan sepak bola Bontokassi Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, sebanyak 2 (dua) ekor, kemudian yang kedua diambil di daerah Dermaga pelabuhan Boddia Dusun Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, sebanyak 2 (dua) ekor, lalu yang ketiga diambil di lapangan sepakbola Dusun Kalongkong Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, sebanyak 3 (tiga) ekor. Tidak lama kemudian, saat diperjalanan perbuatan para terdakwa diketahui dan dikejar warga setempat dengan menggunakan sepeda motor sambil meneriaki dan melempar mobil yang digunakan para terdakwa, sampai mobil tersebut berhenti setelah menabrak tumpukan pasir di jalan raya, sehingga akhirnya warga berhasil menangkap para terdakwa dan menyerahkan beserta barang bukti kepada pihak kepolisian. Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mengetahui siapa-siapa pemilik dari kambing-kambing yang telah diambilnya

dan tidak satupun yang memberikan izin kepada terdakwa I maupun terdakwa II untuk mengambil kambing-kambing tersebut. Terdakwa mempergunakan badik untuk memotong tali yang mengikat kambing-kambing tersebut, kemudian kambing-kambing tersebut diangkut dengan menggunakan mobil xenia, yang terdakwa I dan terdakwa II rental/sewa dari teman terdakwa I. kedua terdakwa tersebut menyewa mobil tersebut untuk mengangkut penumpang ke daerah Sulawesi Barat, oleh karena penumpang tersebut sudah berangkat maka terdakwa I dan terdakwa II berjalan-jalan ke daerah Tanjung dan pada akhirnya sampai di daerah Takalar, niat mengambil kambing tersebut adalah ide bersama karena baik terdakwa I maupun terdakwa II sama-sama membutuhkan uang. Para terdakwa berniat menjual kambing-kambing tersebut untuk keperluan hari raya Idul Adha.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu jenis dakwaan yang terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa alternatif dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I Darwis alias Dawi Bin. Suma

Dg. Mangung dan terdakwa II Iwan Gising Alias Liwang Bin. Dg. Rate yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Takalar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-112/TKLR/Ep.1/09/2013 yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa **Terdakwa I. Darwis alias Dawi Bin. Suma Dg. Mangung dan Terdakwa II. Iwan Gising Alias Liwang Bin. Dg. Rate** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira antara jam 12.30 wita sampai dengan jam 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan juli tahun 2013 bertempat di lapangan sepakbola Bontokassi Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan lapangan sepakbola Dusun Kalongkang Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil ternak berupa 7 (tujuh) ekor kambing, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa II mengendarai kendaraan roda empat/mobil merk Daihatsu xenia dengan nomor polisi DD 680 OV bersama-sama terdakwa I berangkat dari Sungguminasa Kabupaten Gowa menuju Galesong Kabupaten Takalar untuk mencari dan mengambil ternak kambing yang berada di sepanjang jalan Galesong. Setelah sampai di daerah Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Terdakwa II melihat ternak kambing di pinggir jalan sehingga timbul niat untuk mengambilnya, lalu menghentikan mobil. Setelah itu terdakwa I turun dari mobil dan mengambil 4 (empat) ekor ternak kambing dengan cara menangkap dan

menggendong ternak kambing tersebut satu-persatu untuk dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Setelah terdakwa I berhasil mengambil dan memasukkan 4 (empat) ekor ternak kambing ke dalam mobil, kemudian terdakwa II memutar balik mobil yang dikemudikannya ke arah kota Makassar.

- Selanjutnya sewaktu para terdakwa melintas di daerah Galesong Utara arah ke kota Makassar, mereka kembali melihat ternak kambing di dalam lapangan sepakbola, lalu terdakwa I turun dari mobil dan kembali mengambil 2 (dua) ekor ternak kambing yang tidak terikat dengan cara menangkap dan menggendong ternak kambing tersebut satu-persatu ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) ekor ternak kambing yang terikat dengan cara memotong dan memasukkan ternak kambing tersebut ke dalam mobil. Setelah para terdakwa berhasil mengambil sebanyak 7 (tujuh) ekor ternak kambing kemudian terdakwa II kembali mengemudikan mobil yang menuju arah kota Makassar,
- Tidak lama kemudian, saat diperjalanan perbuatan para terdakwa diketahui dan dikejar warga setempat dengan menggunakan sepeda motor sambil meneriaki dan melempar mobil yang digunakan para terdakwa, sampai mobil tersebut berhenti setelah menabrak tumpukan pasir di jalan raya, sehingga akhirnya warga berhasil menangkap para terdakwa dan menyerahkan beserta barang bukti kepada pihak kepolisian.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor ternak kambing atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa I Darwis alias Dawi Bin. Suma Dg.

Mangung dan terdakwa II Iwan Gising alias Liwang Bin. Dg.

Rate sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan, dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada

pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan pokok, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang berupa hewan ;
3. Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1 Setiap orang ;

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang ditujukan kepada subjek hukum atau siapakah terdakwa dalam perkara ini, yang mana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diketahui para terdakwa masing-masing bernama Darwis alias Dawi Bin Suma dg. Mangung dan Iwan Gising alias Liwang bin Dg. Rate dengan masing-masing identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun masing-masing terdakwa sehingga tidaklah terjadi kekeliruan dalam mengadili orang.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang berupa hewan ;

Bahwa terhadap unsur mengambil dimaksudkan sebagai untuk menguasai, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dan mengambil tersebut haruslah disengaja dan barang yang telah diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Bahwa dalam Risalah Penjelasan KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan para terdakwa sendiri diketahui fakta hukum bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah binatang ternak berupa kambing dan membawanya pergi dengan menggunakan mobil xenia ;

Bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah memindahkan dan membawa pergi beberapa ekor kambing dari tempatnya semula ke dalam mobil dan selanjutnya membawanya pergi dan kambing merupakan hewan ternak yang bernilai ekonomis dan berwujud sehingga Hakim berpendapat unsur “mengambil barang berupa hewan” telah terpenuhi ;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;

Bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan para terdakwa sendiri khususnya diketahui fakta bahwa kambing-kambing tersebut adalah milik dari saksi Dg. Taugi binti Umar dg. Makka, saksi Indar dg. Ngoyo bin dg. Mala, saksi Rusdin dg. Situru bin. Sulaiman dan saksi saksi Bado dg. Gading bin. Baco baik sebagian maupun seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak ;

Bahwa unsur memiliki barang dengan melawan hak haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja

dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki ;

Bahwa terhadap unsur melawan hak diartikan juga dengan melawan hukum. Melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian ;

Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil kambing-kambing tersebut sementara sedari awal para terdakwa menyadari bahwa kambing-kambing tersebut bukanlah milik terdakwa I ataupun terdakwa II sementara saksi Dg. Taugi binti Umar dg. Makka, saksi Indar dg. Ngoyo bin dg. Mala, saksi Rusdin dg. Situru bin. Sulaiman dan saksi saksi Bado dg. Gading bin. Baco sekalipun tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada para terdakwa untuk kambing-kambing tersebut sehingga Hakim berkesimpulan perbuatan-perbuatan para terdakwa tersebut tidak memiliki hak secara nyata bertentangan dengan hukum dan hak subyektif saksi Dg. Taugi binti Umar dg. Makka, saksi Indar dg. Ngoyo bin dg. Mala, saksi Rusdin dg. Situru bin. Sulaiman dan saksi saksi Bado dg. Gading bin. Baco, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Bahwa unsur ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kedua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan yang saling bekerja sama secara sadar untuk mewujudkan perbuatan pidana ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dari keterangan para terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah bersama-sama dan bekerja sama untuk mengambil kambing-kambing tersebut, sehingga dari fakta ini Hakim berkesimpulan dalam melakukan perbuatan tersebut telah terjadi kerjasama antara terdakwa I dan terdakwa II oleh karenanya hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Selanjutnya, dakwaan pelengkap dari dakwaan Penuntut Umum, yakni Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Untuk terpenuhinya Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang sifatnya kumulatif, yakni;

- Adanya kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
- Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama);

Dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) ekor kambing pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 di 3 (tiga) tempat berbeda, yakni;

- Bahwa yang pertama diambil di lapangan sepak bola Bontokassi Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa yang kedua diambil di daerah Dermaga pelabuhan Boddia Dusun Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa yang ketiga diambil di lapangan sepakbola Dusun Kalongkong Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, sebanyak 3 (tiga) ekor;

Bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketiga perbuatan tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan jarak waktu yang dekat baik perbuatan pertama hingga perbuatan ketiga kesemuanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengambil kambing dan kambing tersebut bukanlah milik para terdakwa sehingga terlihat adanya kesatuan kehendak dari

perbuatan-perbuatan tersebut, oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa I Darwis alias Dawi Bin. Suma Dg. Mangung dan terdakwa II Iwan Gising alias Liwang Bin. Dg. Rate telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Ternak Yang Dilakukan oleh Dua Orang Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Darwis alias Dawi Bin. Suma Dg. Mangung dan terdakwa II Iwan Gising alias Liwang Bin. Dg. Rate masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Barang Bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu hitam campur putih menggunakan tali pengikat warna biru terbungkus kain warna putih yang melingkar pada leher ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu putih campur coklat muda ;

- 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu hitam campur putih dan terdapat tali warna biru melingkar pada leher ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu merah ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu putih campur coklat muda dalam keadaan hamil dan terdapat tali warna biru melingkar pada leher (dalam keadaan mati) ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu putih campur coklat muda berbintik-bintik dan terdapat tali warna biru melingkar pada leher ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu coklat tua ;
Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;
 - Sebilah badik bergagang dan bersarung kayu dengan panjang mata badik 21,3 cm dan lebar 5,8 cm ;
 - Seutas tali berwarna biru campur tali berwarna kuning ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia New Xi-VVT-I warna hitam metalik Nomor Polisi DD 680 OV tahun pembuatan 2010 ;
 - Sebuah kunci mobil dengan menggunakan gantungan kunci sebuah tas dompet berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Sdr. Dongki Kusumo melalui PT. Astra Sedaya Finance ;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Terdakwa Darwis alias Dawi Bin Suma dg. Mangung dan terdakwa II Terdakwa Iwan Gising alias Liwang bin Dg. Rate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu hitam campur putih menggunakan tali pengikat warna biru terbungkus kain warna putih yang melingkar pada leher ;
Dikembalikan kepada saksi Bado dg. Gading bin. Baco ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu putih campur coklat muda ;
Dikembalikan kepada saksi Rusdin dg. Situru bin. Sulaiman ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu hitam campur putih ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu putih campur coklat muda berbintik-bintik dan terdapat tali warna biru melingkar pada leher ;
Dikembalikan kepada saksi Dg. Taugi binti Umar dg. Makka
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu merah;
 - Foto 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu putih campur coklat muda dalam keadaan hamil dan terdapat tali warna biru melingkar pada leher (dalam keadaan mati);
Dikembalikan kepada saksi Indar dg. Ngoyo bin. Dg. Mala ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu coklat tua;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum ;
 - Sebilah badik bergagang dan bersarung kayu dengan panjang mata badik 21,3 cm dan lebar 5,8 cm;
 - Seutas tali berwarna biru campur tali berwarna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia New Xi-VVT-I warna hitam metalik Nomor Polisi DD 680 OV tahun pembuatan 2010;
 - Sebuah kunci mobil dengan menggunakan gantungan kunci sebuah tas dompet berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Sdr. Dongki Kusumo melalui PT. Astra Sedaya Finance;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.00. (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Analisa Penulis

Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perkara PDM-112/TKLR/Ep.1/09/2013 dan diterapkan dalam putusan nomor 116/Pid.B/2013/PN.TK ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut.

Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa I Darwis alias Dawi Bin Suma dg. Mangung dan Terdakwa II Iwan Gising alias Liwang Bin Dg. Rate dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini dikarenakan para Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Ternak dalam Perkara Putusan Nomor: 116/Pid.B/2013/PN.TK.

Dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai produk-produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat uu) dimaksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara.

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor : 116/Pid.B/2013/PN.TK, yaitu :

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah masing-masing terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokoknya, yakni :

- Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa masing-masing Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP dan selain itu para Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah para Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut masing-masing Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa masing-masing Terdakwa sehat, disamping itu masing-masing Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lantang dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum ;
- Bahwa para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan yang dapat menghapuskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para

Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta tentang sikap dan perilaku para terdakwa dalam persidangan yang bersikap terus terang dan terbuka dalam member keterangan sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pembedaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;l
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Amar Putusan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusannya.

Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili.

- Menyatakan terdakwa I Terdakwa Darwis alias Dawi Bin Suma dg. Mangung dan terdakwa II Terdakwa Iwan Gising alias Liwang bin Dg. Rate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” ;
- Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu hitam campur putih menggunakan tali pengikat warna biru terbungkus kain warna putih yang melingkar pada leher ;
Dikembalikan kepada saksi Bado dg. Gading bin. Baco ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu putih campur coklat muda ;
Dikembalikan kepada saksi Rusdin dg. Situru bin. Sulaiman ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu hitam campur putih ;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu putih campur coklat muda berbintik-bintik dan terdapat tali warna biru melingkar pada leher ;
Dikembalikan kepada saksi Dg. Taugi binti Umar dg. Makka
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu merah;
 - Foto 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina ciri-ciri berbulu putih campur coklat muda dalam keadaan hamil dan terdapat tali warna biru melingkar pada leher (dalam keadaan mati);
Dikembalikan kepada saksi Indar dg. Ngoyo bin. Dg. Mala ;

- 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina cirri-ciri berbulu coklat tua;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum ;
- Sebilah badik bergagang dan bersarung kayu dengan panjang mata badik 21,3 cm dan lebar 5,8 cm;
- Seutas tali berwarna biru campur tali berwarna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia New Xi-VVT-I warna hitam metalik Nomor Polisi DD 680 OV tahun pembuatan 2010;
- Sebuah kunci mobil dengan menggunakan gantungan kunci sebuah tas dompet berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Sdr. Dongki Kusumo melalui PT. Astra Sedaya Finance;
- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.00. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **KAMIS**, tanggal **07 NOPEMBER 2013**, oleh **HJ. MIRA SENDANGSARI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **KHAERUNNISA, SH.**, dan **TRIU ARTANTY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MUKHLIS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **RAMLAH, SH**, Penuntut Umum dan terdakwa ;

3. Analisa Penulis

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan

dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Takalar menyatakan dalam amar putusannya bahwa kedua orang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian hewan yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menghukum masing-masing terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara penulis dengan Ibu Triu Artanty, SH. sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa:

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

Selain itu yang dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau memutus perkara, juga faktor-faktor yang meringankan pada terdakwa harus diperhatikan, beliau juga menyebutkan faktor-faktor yang meringankan yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana antara lain :

1. Karakter yang baik
2. Rasa penyesalan yang dalam
3. Mengaku salah
4. Rekor pekerjaan yang baik
5. Masalah keluarga
6. Umur
7. Tidak cakap
8. Kemungkinan stress emosional
9. Kondisi fisik yang cacat
10. Pendapatan yang sangat rendah
11. Akibat provokasi.

Beliau juga mengatakan bahwa, Hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas yang tinggi, dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi. Hal itu bertujuan agar tidak salah dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Dari hasil wawancara penulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pembedaan (Djoko Prakoso, 1984:67) yaitu :

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut pendapat penulis dengan melihat uraian tersebut diatas maka sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim kepada para terdakwa sudah tepat. Sanksi yang diberikan oleh majelis Hakim yaitu 10 (sepuluh) bulan akan menimbulkan efek jera terhadap kedua terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana itu lagi. Perbuatan para terdakwa merugikan diri mereka masing-masing karena para terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang harus menghidupi keluarganya masing-masing, akan tetapi para terdakwa dalam mengajukan pembelaan (pledoi) tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya. tindak pidana yang dilakukan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat namun dihadapan majelis Hakim para terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannnya serta berjanji untuk tidak

mengulangi lagi perbuatannya. Sanksi ini juga jauh lebih ringan dari apa yang penulis lihat dari isi Pasal 363 ayat (1) KUHP yaitu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, namun hakim dengan berbagai pertimbangan hukumnya menjatuhkan sanksi yang lebih ringan.

Selain itu, sanksi pidana yang diberikan bukanlah untuk menghancurkan masa depan maupun pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian ternak yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dimana terdapat dua orang pelaku diterapkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu juga bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ternak yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor : 116/Pid.B/2013/PN.TK yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

meringankan bagi para terdakwa. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini hal-hal yang memberatkan para terdakwa yaitu, perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat adapun hal-hal yang meringankan para terdakwa yaitu, para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, para terdakwa belum pernah dihukum, dan para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa tersebut telah sejalan dengan teori hukum pidana. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh hakim dinilai sudah tepat, sanksi pidana yang diberikan akan menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa lebih tegas lagi, agar sanksi yang diberikan sangat memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak meresahkan masyarakat.

2. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum, mahasiswa maupun lembaga-lembaga dibidang hukum untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk mengenal lebih jauh apa itu hukum, juga tindak pidana maupun mengenai sanksi-sanksi pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Bandung, 1994..
- Barda Nawawi Anes, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- D. Schaffmeiste N. Keijzer dan E. PH. Sitorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- H.R Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Philpus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* , PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- P.A.F Lamintang. *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- _____. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaa*, Sinar Baru, Bandung 1989.
- _____. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* .Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____ dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 2007.

Soepanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Sumber Internet :

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=pengadilan+negeri+takalar>

<http://setaaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html?m=1>



LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI TAKALAR

JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 11 TELP (0418) 21018 Fax. 21009
TAKALAR 92211 SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22.U16/225 / VIII /2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takalar :

MUHLIS, SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

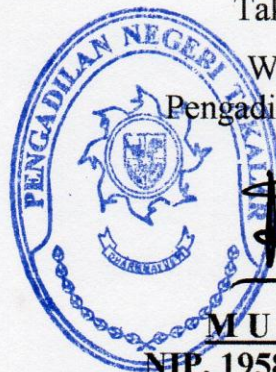
Nama : ASROWINSYAH ROSA UTAMA
NIM : B 111 10 489
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : ***"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
116/PID.B/2013/PN. TK)"***

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Takalar dari Tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Takalar, 07 Agustus 2014

Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Takalar



MUKHLIS, SH.
NIP. 19581110 198603 1 009